

PEMBENTUKAN DAN PENGUATAN KELOMPOK SIAGA BENCANA (KSB) SEBAGAI WUJUD KESIAPSIAGAAN MASYARAKAT TERHADAP BANJIR DI KANAL BANJIR BARAT KOTA SEMARANG

Reny Yesiana^{1*}, Wiwandari Handayani², Mega Anggraini³

¹Departemen Sipil dan Perencanaan, Sekolah Vokasi, Undip

²Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota, Fak Teknik, Undip

³Initiative for Urban Climate Change and Environment (IUCCE)

*E-mail: renyyesiana@live.undip.ac.id

Abstract

Flood management became one of the development priorities in Semarang since it leading to massive loss and damage to life and assets. The flood disaster in Kaligarang that occurred in 1990, has been the driving force to anticipate the flood risk in the West Flood Canal. Semarang City Government has made efforts to minimize the risk of flooding through the construction of Jatibarang reservoir. However, with the current conditions, such as increased rainfall intensity and reduced upstream catchment function, the risk of flooding in areas of West Flood Canal is also increasing, so communities preparedness is absolutely necessary. As part of supporting the government of Semarang City, Mercy Corps Indonesia in collaboration with the Initiative for Urban Climate Change and Environment (IUCCE) and the Initiative for Regional Development and Environmental Management (IRDEM) with support funding from Z Zurich Foundation to help community in sub-districts along Semarang West Flood Canal to have proper planning in dealing with flood risk. One of community preparedness form is to establish a disaster preparedness group (kelompok siaga bencana-KSB) which functions to organize communities when facing disasters. The purpose of this article is to examine the process and benefits of the KSB establishment for the community and local government (sub-district), and its become lesson learned for other regions. The research method is qualitative, with primary data collection techniques is semi-open interviews. Sampling technic used in this interview was purposive sampling, because respondent was chosen by their competency. Besides, observations were done on each activities and literature review. The results of this study are the process of implementing the establishment and strengthening of the KSB and increasing the benefits of KSB about 37% because the community has received disaster preparedness training.

Keywords: preparedness, disaster preparedness group, flood

Abstrak

Penanganan banjir menjadi salah satu prioritas pembangunan di Kota Semarang karena menyebabkan kerugian besar dan kerusakan bagi aset dan kehidupan. Kejadian banjir di Kaligarang yang terjadi pada tahun 1990, menjadi pendorong untuk melakukan upaya antisipasi terhadap risiko banjir di Kanal Banjir Barat. Pemerintah Kota Semarang telah melakukan upaya untuk meminimalisir risiko banjir melalui pembangunan DAM Jatibarang. Namun dengan kondisi yang berkembang pada saat ini, seperti kenaikan intensitas curah hujan dan berkurangnya fungsi resapan di hulu, risiko terjadinya banjir di area Kanal Banjir Barat juga semakin meningkat, sehingga kesiapsiagaan masyarakat mutlak diperlukan. Sebagai bentuk dukungan terhadap pemerintah Kota Semarang, Mercy Corps Indonesia (MCI) bekerjasama dengan Initiative for Urban Climate Change and Environment (IUCCE)

dan Initiative for Regional Development and Environmental Management (IRDEM) dengan dukungan dana dari Z Zurich Foundation berupaya untuk membantu masyarakat di area Kanal Banjir Barat, Semarang agar memiliki perencanaan yang tepat dalam menangani risiko banjir. Salah satu bentuk kesiapsiagaan masyarakat adalah pembentukan kelompok siaga bencana (KSB) yang berfungsi untuk mengorganisir masyarakat ketika menghadapi bencana. Adapun tujuan dari artikel ini adalah untuk mengkaji proses dan manfaat pembentukan KSB bagi masyarakat dan pemerintah lokal (kelurahan) serta menjadi pembelajaran untuk wilayah lain. Metode penelitian ini adalah kualitatif, dengan teknik pengumpulan data primer wawancara semi terbuka. Teknik sampling yang digunakan untuk wawancara ini adalah purposive sampling karena narasumber dipilih sesuai kompetensinya. Selain itu juga dilakukan observasi pada setiap kegiatan serta telaah dokumen. Hasil dari kajian ini adalah proses implementasi pembentukan dan penguatan KSB serta manfaat terbentuknya KSB mengalami peningkatan sebesar 37% karena masyarakat telah mendapat pelatihan kesiapsiagaan bencana.

Kata Kunci: kesiapsiagaan, kelompok siaga bencana (KSB), banjir

Pendahuluan

Definisi bencana berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana adalah peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau non alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. Salah satu bencana yang ditimbulkan oleh faktor alam adalah banjir yang dapat terjadi setiap saat dan sering mengakibatkan korban jiwa serta kerugian harta maupun benda. Kejadian banjir tidak dapat dicegah, namun dapat dikendalikan dan dikurangi dampak kerugiannya (Umar, 2013). Dengan kondisi demikian, maka manajemen bencana sangat dibutuhkan.

Perjalanan yang sangat pahit mengajarkan bahwa masyarakat mutlak dan harus terlibat dalam kesiapsiagaan mengantisipasi bencana. Banyak korban yang tidak dapat diselamatkan karena kurang dan lambannya pertolongan. Hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan

masyarakat dalam menghadapi bencana tersebut. Sebagian lagi tidak membantu karena tidak tahu apa yang harus dilakukan. Namun, ada juga anggota masyarakat yang berupaya membantu korban, tetapi karena ketidak-tahuan, justru menambah beban korban. Oleh karena itu kesiapsiagaan menjadi sangat penting (Hidayati, 2008).

Pada siklus manajemen bencana (Carter, 1991), kesiapsiagaan masuk dalam kategori pra bencana. Kesiapsiagaan ini biasanya muncul karena secara psikologis pernah mengalami bencana tersebut. Kesiapsiagaan bencana merupakan salah satu bagian dari proses manajemen bencana dan menjadi elemen penting yang bersifat pro aktif sebelum terjadinya suatu bencana (Noor, 2014). Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta langkah yang tepat dan berdaya guna. Kesiapsiagaan pada dasarnya merupakan semua upaya yang dilakukan sebelum terjadi bencana

alam untuk merespon secara cepat dan efektif keadaan pada saat dan setelah bencana. Upaya ini sangat diperlukan masyarakat untuk mengurangi risiko/dampak bencana alam, termasuk korban jiwa, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan (Hidayati, 2008).

Beberapa hal yang termasuk dalam tindakan kesiapsiagaan bencana adalah penyusunan rencana penanggulangan bencana, pemeliharaan sumber daya dan pelatihan personil. Kesiapan dan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi banjir yang diharapkan adalah bersifat proaktif untuk dapat melakukan langkah-langkah pencegahan, tanggap darurat serta rehabilitasi yang bekerjasama dengan pemerintah dan LSM (Umar, 2013). Masyarakat sebagai pelaku utama dalam kebencanaan, sehingga partisipasi masyarakat sangat penting dalam penanggulangan bencana baik itu tingkat keluarga atau kelompok masyarakat. Disamping itu, keterbatasan kemampuan pemerintah juga menjadi pendorong kemandirian masyarakat untuk siap siaga terhadap bencana (Paramesti, 2011).

Pada tahun 1990, Kota Semarang mengalami banjir bandang yang mengakibatkan korban jiwa dan kehilangan aset. Kejadian tersebut mendorong pemerintah Kota Semarang melakukan penanganan terhadap banjir, salah satunya melalui pembangunan waduk Jatibarang. Pembangunan sarana prasarana untuk mengantisipasi terjadinya banjir memang sangat penting, namun mempersiapkan masyarakat dalam rangka kesiapsiagaan juga tidak kalah penting. Sebagai bentuk dukungan terhadap pemerintah Kota Semarang, Mercy Corps Indonesia (MCI) bekerjasama dengan *Initiative for Urban Climate Change and Environment (IUCCE)* dan *Initiative for Regional Development and Environmental Management (IRDEM)* dengan dukungan

dana dari *Z Zurich Foundation* berupaya untuk membantu masyarakat di kelurahan sepanjang Kanal Banjir Barat, Semarang agar memiliki perencanaan yang tepat dalam menangani risiko banjir. Program ini diharapkan terkoordinasi dan terhubung dengan program di kelurahan dan dapat secara efektif bekerja sama untuk membantu warga yang terkena banjir. Program ini juga sejalan dengan program dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang agar masyarakat di daerah-daerah rawan bencana lebih responsif dan siap menghadapi bencana. Dalam rangka kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana banjir, maka masyarakat mengusulkan dilakukan pembentukan Kelompok Siaga Bencana (KSB).

Partisipasi masyarakat melalui KSB merupakan salah satu bentuk kesiapsiagaan yang dilakukan di daerah rawan bencana, seperti yang dilakukan masyarakat Pauh, Kabupaten Padang. Kegiatan peningkatan kesiapsiagaan bencana tidak lagi hanya dengan konsep penyuluhan dan sosialisasi semata namun mulai mengajak masyarakat untuk terlibat menjadi bagian dari proses (Seftiani, 2014). Begitu juga yang terjadi di Kelurahan Wonosari, Kota Semarang, pada saat sistem kelembagaan belum terorganisir dan tertata dengan baik hal ini berpengaruh terhadap distribusi logistik, kebutuhan dasar, pengungsian dan sistem komando yang bergerak sendiri-sendiri dan menyebabkan masyarakat bingung. Untuk mengatasi kondisi tersebut, masyarakat Kelurahan Wonosari juga membentuk Kelompok Siaga Bencana melalui arahan program ACCCRN (*Asian Cities Climate Change Resilient Network*) (Nurromansyah & Setyono, 2014).

Dengan pertimbangan di atas, maka masyarakat yang tinggal di Kanal Banjir Barat dan pernah mengalami

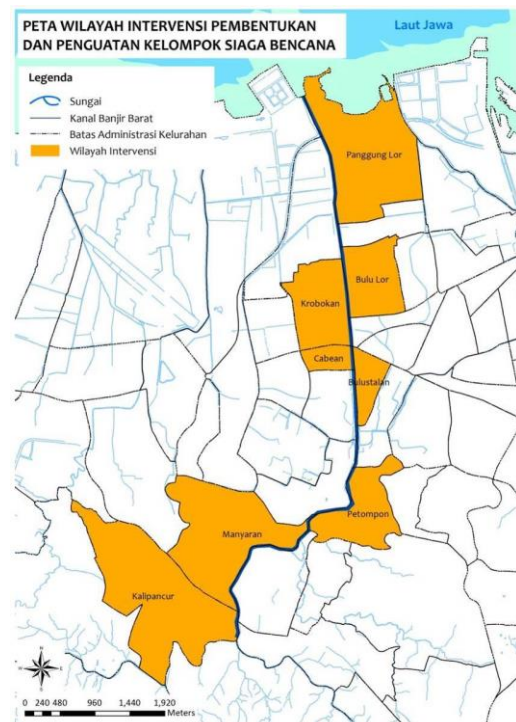
banjir bandang perlu membentuk organisasi dalam wadah kelompok siaga bencana.

Dengan pembentukan dan penguatan KSB ini diharapkan masyarakat siap siaga ketika bencana terjadi. Adapun tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk mengkaji proses dan manfaat pembentukan KSB bagi masyarakat dan pemerintah lokal (kelurahan), sehingga menjadi pembelajaran untuk wilayah lain.

Lingkup Wilayah dan Metoda

Wilayah kajian ini meliputi 8 kelurahan yang terletak di Kanal Banjir Barat Kota Semarang, yaitu Kelurahan Manyaran, Krobakan, Petompon, Bulustalan, Kalipancur, Panggung Lor, Bulu Lor dan Cabean. Wilayah ini merupakan bagian dari program *Zurich Flood Resilience Program (ZFRP)*, yang mana masyarakat di 8 kelurahan ini memprioritaskan kegiatan pembentukan kelompok siaga bencana untuk mengatasi bencana yang pernah terjadi di daerah masing-masing.

Oleh karena tujuan penulisan artikel ini adalah mengkaji proses dan manfaat pembentukan KSB bagi masyarakat dan pemerintah lokal (kelurahan), maka metode yang digunakan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data primer adalah wawancara semi terbuka. Disamping itu, dalam pengumpulan data ini juga dilakukan dengan observasi pada setiap kegiatan dan telaah dokumen.



Sumber: Mercy Corp Indonesia dan IUCCE, 2017

**Gambar 1 Peta Administrasi 8 Kelurahan
di Kanal Banjir Barat
Kota Semarang**

I. Wawancara, dilakukan dengan memberi pertanyaan semi terbuka, yaitu pertanyaan yang memiliki pilihan atas jawaban tersebut, namun masih diperlukan penggalan informasi/ alasan atas jawaban yang telah diberikan.

Teknik sampling yang digunakan untuk wawancara ini adalah *purposive sampling*, karena narasumber dipilih sesuai dengan kompetensinya.

Jumlah responden yang diwawancarai sebanyak 24 orang meliputi KSB dan aparat kelurahan.

Tabel 1 Pemilihan Responden

Responden	Alasan Pemilihan Responden	Jumlah Responden	Tujuan
Ketua/ Sekretaris dan anggota aktif di 8 KSB	Ketua/ sekretaris dipilih karena terlibat langsung dalam program ini, sedangkan anggota yang dipilih sebagai narasumber sebanyak 1 orang yang aktif dengan tujuan untuk memferivikasi jawaban dari ketua/sekretaris KSB.	Ketua: 8 orang Anggota aktif: 8 orang	untuk mengetahui perubahan kemanfaatan program bagi masyarakat sebagai penerima manfaat.
Aparat kelurahan	Kelurahan: instansi pemerintah yang menaungi wilayah intervensi pembentukan dan penguatan KSB.	Kelurahan: 8 orang	Untuk mengetahui manfaat program terhadap kelurahan
Total		24 orang	

Sumber: Penulis, 2017

2. Observasi, dilakukan dengan mengamati dan mempelajari apa saja yang terjadi pada kegiatan yang telah dilakukan. Hal-hal yang diobservasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2 Aspek Pengamatan pada Kegiatan Observasi

Kegiatan Observasi	Aspek yang diamati
Mengamati penyusunan rencana kontinjensi di masing-masing KSB	Keaktifan masyarakat dalam memberi usulan terhadap substansi rencana kontinjensi: peta deliniasi banjir/genangan, jalur evakuasi dan tempat pengungsian sementara, program kerja, alur koordinasi
Mengamati pelatihan kesiapsiagaan banjir yang diikuti oleh masyarakat	- Antusiasme KSB dalam mengikuti pelatihan - Keaktifan dalam pelatihan

Sumber: Penulis, 2017

3. Telaah dokumen, melihat dan mengkaji berbagai laporan seperti laporan *Community Based Development Risk Management (CBDRM)* dari program *Zurich Flood Resilience Program (ZFRP)*, laporan rencana kontinjensi masyarakat di 8 kelurahan yang terlibat, *narrative report*, serta literatur kesiapsiagaan bencana di wilayah lain.

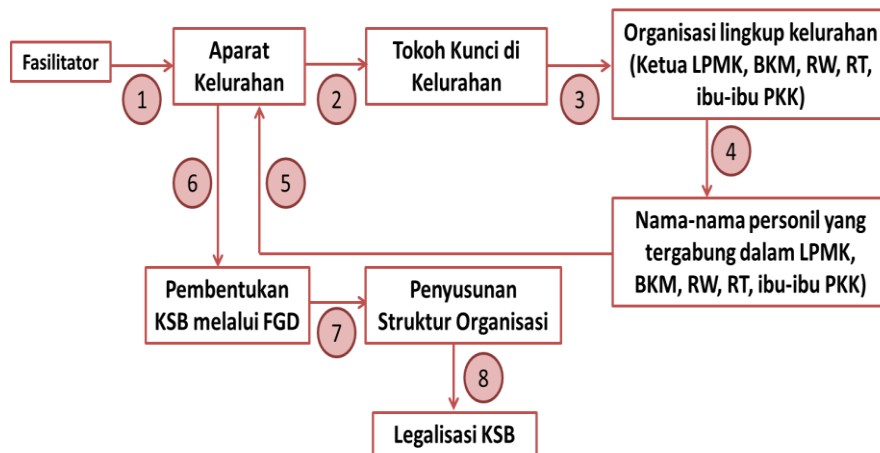
Hasil Analisis dan Pembahasan

A. Proses Pembentukan dan Penguatan KSB di 8 Kelurahan Banjir Kanal Barat Kota Semarang

Pembentukan KSB dilakukan di Kelurahan Kalipancur, Manyaran, Cabean, Bulustalan, Petompon, Bulu Lor, Panggung Lor, dan Krobokan. Proses pembentukan KSB dilakukan melalui FGD dengan masyarakat yang difasilitasi oleh Tim IUCCE. Daftar nama masyarakat yang diundang dalam kegiatan “FGD pembentukan KSB” diperoleh melalui *stakeholder mapping*. Fasilitator melakukan wawancara dengan pihak kelurahan dan memperoleh beberapa tokoh kunci yang akan dijadikan narasumber. Sebelum pelaksanaan FGD pembentukan KSB, comdev melakukan konfirmasi kembali kepada kelurahan atas daftar nama warga yang diperoleh dari hasil *stakeholder mapping*. Peranan yang diutamakan berasal dari organisasi lingkup kelurahan seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), Ketua RW dan RT, ibu-ibu yang tergabung dalam Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK) kelurahan/RW/RT.

**Pembentukan dan Penguatan Kelompok
Siaga Bencana (KSB) Sebagai Wujud
Kesiapsiagaan Masyarakat Terhadap Banjir
Di Kanal Banjir Barat Kota Semarang**

(Reni Yesiana, dkk)



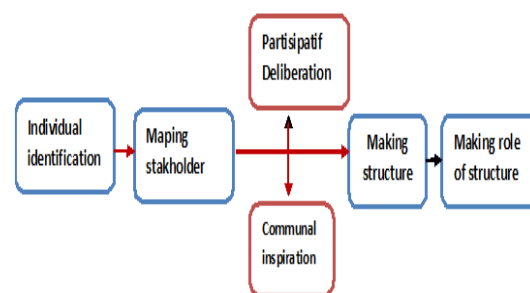
Sumber: Hasil Analisis, 2017

Gambar 2 Proses pembentukan Kelompok Siaga Bencana di 8 Kelurahan Kanal Banjir Barat Kota Semarang

Keterangan:

1. Fasilitator melakukan wawancara untuk menemukan tokoh kunci
2. Aparat kelurahan memberikan informasi tokoh kunci yang akan dijadikan sebagai narasumber
3. Tokoh kunci berasal dari organisasi lingkup kelurahan (Ketua LPMK, BKM, RW, RT, ibu-ibu PKK)
4. Tokoh kunci memberikan informasi nama-nama yang akan diundang dalam FGD pembentukan KSB
5. Fasilitator melakukan verifikasi kepada aparat kelurahan atas nama-nama yang akan diundang dalam pembentukan KSB
6. FGD pembentukan KSB
7. Melakukan penyusunan struktur organisasi KSB
8. Melakukan legalisasi KSB dengan SK Kecamatan dan Kelurahan.

Pada dasarnya proses pembentukan ini hampir sama dengan pola yang disampaikan oleh Rinaldi (2015) yang tergabung dalam Jaringan Kerja Pengembang Partisipasi Indonesia Sakato (JEMARI Sakato), bahwa proses tersebut diawali dengan identifikasi individu yang akan menjadi penggerak kelompok. Kelompok merupakan modal sosial yang harus dibangun secara partisipatif dan representatif. Identifikasi ini bisa dilakukan secara partisipatif dengan menilai karakter personal, minat, tingkat pemahaman, basis pengalaman, serta pola-pola kerja sosial individu dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat.



Sumber: Rinaldi, 2015

Gambar 3 Proses pembentukan Kelompok Siaga Bencana

Namun, perlu ditekankan bahwa pengenalan karakter dan minat serta tingkat pemahaman masing-masing individu tidak bisa secara langsung didapatkan, sehingga penjaringan individu pada program ini dilakukan melalui tokoh-tokoh masyarakat agar efisiensi waktu, tenaga maupun biaya. Kelemahan dari proses ini adalah orang-

orang yang tergabung dalam organisasi lingkup kelurahan LPMK, BKM, Ketua RW, Ketua RT dan PKK sebagian besar didominasi oleh usia di atas 50 tahun dan usia tersebut masuk dalam kategori lansia yang berarti bahwa usia ini masuk dalam kategori rentan. Padahal dalam kesiapsiagaan lebih banyak dibutuhkan fisik yang kuat.

Tabel 3 Anggota KSB Berdasarkan Kelompok Usia

Kelompok Usia	Jumlah	Persentase
0-5	0	0%
6-9	0	0%
10-14	0	0%
15-19	13	3%
20-24	8	2%
25-34	38	9%
35-49	151	34%
50+	233	53%
Total	443	100%

Sumber: Absensi KSB, 2017

Setelah KSB terbentuk, selanjutnya dilegalkan oleh Camat masing-masing. Namun terdapat satu KSB yang dilegalkan oleh pihak kelurahan, yaitu KSB Kalipancur. Hal ini dikarenakan KSB Kalipancur pada dasarnya sudah terbentuk pada tahun 2016, sebelum adanya intervensi program ZFRP. Pembentukan KSB ini didukung oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah selaku instansi yang memiliki kewenangan di bidang tersebut. BPBD sangat terbantu dengan program ZFRP karena dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang, terdapat target pembentukan kelurahan tangguh bencana.

Tabel 4 Daftar Legalisasi Surat Keputusan (SK) KSB yang dilegalisasi Kecamatan

No	Kelurahan	Kecamatan	Jumlah Personil KSB			No. SK	Waktu Legalisasi	Pihak yang Melegalisasi
			LK	PR	Total			
1	Cabean	Semarang Barat	24	6	30	360/13/V.2017	8 Mei 2017	Camat Semarang Barat
2	Manyaran		27	6	33			
3	Krobokan		22	10	32			
4	Bulu Lor	Semarang Utara	18	7	25	466.I/V.2017	Mei 2017	Camat Semarang Utara
5	Panggung Lor		19	5	24			
6	Petompon	Gajah Mungkur	17	6	23	360/11/V.2017	Mei 2017	Camat Gajah Mungkur
7	Bulustalan	Semarang Selatan	19	6	25	360/365/V.2017	29 Mei 2017	Camat Semarang Selatan
8	Kalipancur	Ngaliyan	34	1	35	360/46/IV/2016	12 April 2016	Lurah Kalipancur

Sumber: SK KSB, 2017

Sebagai persyaratan menjadi kelurahan tangguh bencana, setiap KSB juga harus mendapat legalisasi dari kelurahan. Pembentukan Kelurahan Tangguh Bencana (Katana) ini sesuai dengan Peraturan Kepala BNPB No. 1

Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh. Oleh karena itu, disusun SK KSB yang telah dilegalisasi oleh Kelurahan. Daftar SK tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Pembentukan dan Penguatan Kelompok
Siaga Bencana (KSB) Sebagai Wujud
Kesiapsiagaan Masyarakat Terhadap Banjir
Di Kanal Banjir Barat Kota Semarang**

(Reni Yesiana, dkk)

Tabel 5 Daftar Legalisasi Surat Keputusan (SK) KSB yang dilegalisasi Kelurahan

No	Kelurahan	Jumlah Personil KSB			No. SK	Waktu Legalisasi	Pihak yang Melegalisasi
		LK	PR	Total			
1	Cabean	18	11	29	072/V.2017	30 Oktober 2017	Lurah Cabean
2	Manyaran	31	6	37	360/27/X/2017	10 Oktober 2017	Lurah Manyaran
3	Krobokan	17	10	27	25/V.2017	30 Oktober 2017	Lurah Krobokan
4	Bulu Lor	19	6	25	400/20/X.2017	31 Oktober 2017	Lurah Bulu Lor
5	Panggung Lor	21	4	25	460/21/IX/2017	22 September 2017	Lurah Panggung Lor
6	Petompon	17	7	24	362/09/X/2017	10 Oktober 2017	Lurah Petompon
7	Bulustalan	18	7	25	360/10/X/2017	13 Oktober 2017	Lurah Bulustalan
8	Kalipancur	34	1	35	360/46/IV/2016	12 April 2016	Lurah Kalipancur

Sumber: SK KSB, 2017

Pasca pembentukan KSB, beberapa KSB sudah menindaklanjuti dengan kegiatan kebersihan lingkungan, seperti perbaikan saluran sanitasi atau perbaikan gorong-gorong seperti yang telah dilakukan oleh KSB Panggung Lor. Namun, ada juga KSB yang belum memiliki kegiatan pasca pembentukan KSB dan hanya sebatas mengikuti

agenda dari program. Inisiasi masyarakat terlihat pada wilayah banjir kanal barat bagian hilir, dan setelah dikaji lebih lanjut, wilayah hilir ini beberapa tahun yang lalu sering terkena banjir maupun rob. Dengan adanya kejadian tersebut, menyebabkan masyarakat lebih sigap dalam menghadapi ancaman yang serupa.

Tabel 6 Kegiatan Pasca Pembentukan KSB

No	Kelurahan	Kecamatan	Kegiatan yang telah dilakukan Pasca Pembentukan KSB		Frekuensi
			Fisik	Non Fisik	
1	Cabean	Semarang Barat	-	Sosialisasi kesiapsiagaan kepada masyarakat di luar pengurus KSB. Dimasukkan dalam acara Kelurahan, seperti rapat pada saat memberikan uang transport kepada ketua RT, RW, LPMK.	Sebulan sekali atau 3 bulan sekali
2	Manyaran		-	Sosialisasi kesiapsiagaan di masing-masing RW dan masyarakat berusaha mengatasi hal-hal yang menyebabkan banjir.	-
3	Krobokan		-	Sosialisasi KSB ke masyarakat/ tokoh-tokoh masyarakat di luar pengurus KSB, baik secara informal maupun dimasukkan dalam rapat formal (rapat BKM). Lebih kepada menanamkan pemahaman tentang pentingnya KSB dalam kesiapsiagaan bencana	Mingguan dan Bulanan
4	Bulu Lor	Semarang Utara	Koordinasi dengan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Tirta Lancar untuk membersihkan drainase atau gorong-gorong yang tersumbat karena keberadaan sampah dari pedagang kaki lima (PKL)	-	Bulanan

No	Kelurahan	Kecamatan	Kegiatan yang telah dilakukan Pasca Pembentukan KSB		Frekuensi
			Fisik	Non Fisik	
5	Panggung Lor		Kerjabakti, Perbaikan saluran sanitasi yang berpotensi menyebabkan banjir (kelompok tergabung dalam Paguyuban Pengendalian dan Penanggulangan Air Pasang Panggung Lor (P5L)	-	Bulanan
6	Petompon	Gajah Mungkur	-	-	-
7	Bulustalan	Semarang Selatan	-	-	-
8	Kalipancur	Ngaliyan	-	Kegiatan pengajian berlangsung sebelum ada program ZFRP dan kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan keimanan anggota KSB.	40 hari sekali

Sumber: Hasil Wawancara, 2017

B. Kegiatan Kelompok Siaga Bencana

1. Penyusunan Rencana Kontinjensi Kelurahan Siaga Bencana

Penyusunan rencana kontinjensi merupakan bagian dari kesiapsiagaan yang diamanatkan dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana. Rencana kontinjensi merupakan pedoman kesiapsiagaan dan tanggap darurat banjir untuk mewujudkan Kelurahan Tangguh Bencana Banjir. Rencana kontinjensi berisi peta wilayah terdampak banjir, jalur evakuasi dan tempat pengungsian sementara, pedoman sebelum dan sesudah banjir serta peran kelompok siaga bencana. Proses penyusunan rencana kontinjensi melibatkan masyarakat melalui FGD. Dalam penyusunan rencana kontingensi ini mendapat dukungan dari BPBD. Konsultasi dengan BPBD secara kontinyu dilakukan oleh tim implementer, bahkan BPBD juga menghadiri FGD dan ikut memberikan pengarahan kepada KSB terkait Kelurahan Tangguh Bencana. Dengan demikian KSB sudah mulai terhubung dengan BPBD. Rencana kontinjensi selanjutnya diverifikasi kembali kepada

masyarakat melalui rapat bersama anggota KSB. Dokumen Rencana Kontinjensi yang telah diperbaiki disebarluaskan kepada Kelurahan, BPBD, Polisi (Bintara Pembina Desa-Babinsa) dan TNI (Bintara Pembinaan dan Keamanan Ketertiban Masyarakat-Babinkamtibmas).



Sumber: Dokumentasi, 2017

Gambar 4 Penyusunan Rencana Kontinjensi melalui FGD

2. Pelatihan Kesiapsiagaan Bencana

Pelatihan kesiapsiagaan ini merupakan bekal yang diberikan kepada KSB dalam menghadapi bencana banjir atau kebencanaan lainnya. Sangat penting untuk memberikan pelatihan kepada mereka yang akan menerapkan bagian dari kesiapsiagaan bencana (Nazli, Sipon, & Husni Mohd Radzi, 2014). KSB bagian dari masyarakat yang

berperan juga sebagai relawan dalam memberikan pertolongan pertama kepada masyarakat sekitarnya. Pelatihan ini meliputi pemberian teori dan praktek. Teori diberikan di sekretariat Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) Sukomakmur, Desa Wisata Kandri sedangkan praktiknya di lakukan di Waduk Jatibarang. Adapun materi yang diberikan pada saat pelatihan meliputi:

1. Kelurahan tangguh bencana disampaikan oleh BPBD Kota Semarang
2. Kebijakan Manajemen Logistik dan Peralatan Bencana disampaikan oleh BPBD Kota Semarang
3. Shelter dalam Rangka Kesiapsiagaan Penanganan Darurat Bencana Banjir disampaikan oleh BPBD Kota Semarang
4. Praktek Evakuasi dan *Early Warning System* disampaikan oleh BPBD Kota Semarang
5. Teknik Pertolongan di Air disampaikan oleh Kesatuan Brimob Simongan Kota Semarang
6. Mekanisme Komunikasi saat Bencana disampaikan oleh Relawan BPBD Kota Semarang
7. Pertolongan Pertama disampaikan oleh Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Semarang

Simulasi yang dilakukan meliputi:

1. Simulasi Panggilan Luar Biasa
Praktek simulasi evakuasi jika terjadi bencana secara tiba-tiba. Peserta dibangunkan dengan sirine kemudian dikumpulkan dan diminta untuk mencari korban.
2. Simulasi mekanisme kesiapsiagaan banjir
Peserta diminta melakukan simulasi mekanisme kesiapsiagaan banjir (dari proses komunikasi, pertolongan pertama, shelter, hingga *rescue* dan dapur umum.



Sumber: Dokumentasi, 2017

Gambar 5 Pelatihan Masyarakat dalam Kesiapsiagaan Banjir di Kanal Banjir Barat Kota Semarang

Tingkat keberhasilan pelatihan ini diukur melalui *pretest* dan *posttest*. Nilai tertinggi *pretest* yaitu 8,8 dan *posttest* sebesar 9 dengan skala penilaian 1-10. Nilai rata-rata test mengalami peningkatan dari 6,5 menjadi 7,3 atau 12%.

Tabel 7 Nilai Pretest dan Posttest pada Pelatihan Kesiapsiagaan Banjir di Kanal Banjir Barat Kota Semarang

Test	Nilai Tertinggi	Nilai Terendah	rata-rata
Pretest	8,8	4,0	6.5
Posttest	9,0	4,8	7.3

Sumber: Hasil Olah Pretest dan Posttest, 2017

Sebanyak 68 orang yang mengikuti pelatihan, 37 orang (54%) mengalami peningkatan nilai, 19 orang (28%) mengalami penurunan, 5 orang (7%) memiliki nilai stagnan dan 7 orang (10%) tidak mengerjakan *posttest*. Peningkatan

nilai paling tinggi yaitu oleh ketua KSB Bulu Lor sebesar 62%. Terdapat beberapa kendala dalam mengerjakan *posttest* yaitu (i) hujan yang sangat deras dan tenda mengalami kebocoran (ii) kondisi peserta sudah sangat kelelahan mengikuti pelatihan 2 hari 1 malam. Waktu dan tempat yang tepat sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pelatihan kesiapsiagaan bencana (Nazli et al., 2014). Oleh karena itu, pelatihan sebaiknya tidak dilakukan pada musim-musim penghujan.

Tabel 8 Peningkatan Nilai pada Pelatihan Kesiapsiagaan Banjir di Kanal Banjir Barat Kota Semarang

Klasifikasi	Rentang Peningkatan	Jumlah (orang)	%
Tinggi	<23%	28	41
Sedang	23%-42%	8	12
Rendah	>42%	1	1
Total		37	54

Sumber: Analisis, 2017

Tabel 9 Penurunan Nilai pada Pelatihan Kesiapsiagaan Banjir di Kanal Banjir Barat Kota Semarang

Klasifikasi	Rentang Penurunan	Jumlah (orang)	%
Tinggi	<-10%	14	21
Sedang	10%-16%	3	4
Rendah	>16%	2	3
Total		19	28

Sumber: Analisis, 2017

Walaupun terjadi penurunan nilai untuk melihat pemahaman anggota KSB terhadap materi yang diberikan, namun peningkatan yang terjadi jauh

lebih banyak dibandingkan penurunan. Hal ini menandakan pemahaman anggota KSB mengalami peningkatan.

3. Bantuan Peralatan Kesiapsiagaan

Bantuan peralatan juga diberikan dalam rangka menunjang kegiatan KSB. Program ini telah memberikan peralatan kesiapsiagaan berupa alat komunikasi *handy talky* (HT), senter, lampu kepala (*headlamp*), tali lempar, kotak obat dan peluit. Peralatan itu diserahkan kepada masing-masing KSB.



Sumber: Dokumentasi, 2017

Gambar 6 Pemberian Peralatan Kesiapsiagaan Bencana

C. Perubahan yang Terjadi Semenjak Program Dimulai

Pembentukan dan penguatan KSB telah menghasilkan beberapa perubahan yang terjadi semenjak awal dimulai sampai saat ini. Berdasarkan hasil wawancara, perubahan yang terjadi semenjak adanya aktivitas ini adalah sebagai berikut:

Tabel 10 Perubahan yang Terjadi Semenjak Pembentukan dan Penguatan Kelompok Siaga Bencana (KSB) Dilaksanakan

Kategori Perubahan	Keterangan
Peningkatan kepedulian, Semangat dan kebersamaan	<ul style="list-style-type: none"> Masyarakat lebih perhatian terhadap wilayahnya, masyarakat saling memberikan informasi dan saling mengingatkan tentang program kebencanaan. Ada semangat dan kebersamaan antar anggota KSB di kelurahan masing-masing maupun dengan kelurahan lainnya di Kanal Banjir Barat Kota Semarang.
Perubahan Pola Pikir	<ul style="list-style-type: none"> Pola pikir masyarakat sudah lebih maju dari sebelumnya terhadap bencana, sehingga masyarakat lebih waspada jika hujan turun.

**Pembentukan dan Penguatan Kelompok
Siaga Bencana (KSB) Sebagai Wujud
Kesiapsiagaan Masyarakat Terhadap Banjir
Di Kanal Banjir Barat Kota Semarang**

(Reni Yesiana, dkk)

Kategori Perubahan	Keterangan
	<ul style="list-style-type: none"> Masyarakat kini sudah mengetahui peringatan dini untuk antisipasi jika bencana terjadi. Masyarakat lebih preentif sebelum bencana terjadi karena banyak relawan. Masyarakat menjadi lebih paham resiko bencana-bencana banjir, sehingga bisa memberikan peringatan dini kepada warga untuk antisipasi bencana.
Lebih Siaga	<ul style="list-style-type: none"> Masyarakat lebih siaga terutama pada perumahan yang sering longsor saat ini. Dapat memberikan tanda-tanda peringatan kepada warga apabila terjadi hujan deras. Masyarakat lebih mengetahui penanganan awal bencana dan lebih siaga. Dapat memberikan tanda-tanda peringatan kepada warga apabila terjadi hujan deras. Lebih kepada kesiapan dan perubahan kesadaran untuk waspada dini terhadap bencana.
Peningkatan ketrampilan	<ul style="list-style-type: none"> Bisa menolong orang karena mendapat pelatihan pertolongan pertama dan penyelamatan di air.
Perubahan perilaku	<ul style="list-style-type: none"> KSB ikut pelatihan di Jatibarang dan pada saat ada rumah roboh, KSB juga ikut membantu Pada saat terjadi bencana, ditangani secara cepat dan KSB bertindak langsung untuk membantu di lapangan.

Sumber: Hasil Wawancara, 2017

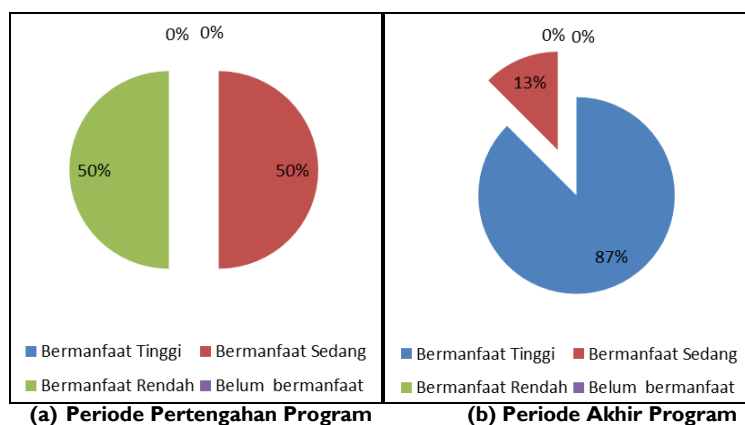
D. Kemanfaatan Program Bagi Masyarakat

1. Manfaat Program Bagi masyarakat

Program ini diharapkan bisa memberikan manfaat bagi masyarakat di Kanal Banjir Barat Kota Semarang. Penilaian kemanfaatan ini diperoleh melalui wawancara terutama kepada penerima manfaat langsung. Skor kemanfaatan untuk semua intervensi terbagi menjadi 4 klasifikasi, yaitu:

- 1 : belum memiliki kemanfaatan
- 2 : kemanfaatan rendah
- 3 : kemanfaatan sedang
- 4 : kemanfaatan tinggi

Pengukuran Kemanfaatan untuk program pembentukan dan penguatan KSB dilakukan dua kali, dengan tujuan untuk mengetahui dampak program terhadap masyarakat. **Tahap pertama** (i) yaitu pada saat pertengahan program berlangsung (Mei 2017), yaitu sampai dengan terlaksananya penyusunan rencana kontinjensi. Sedangkan **pengukuran tahap dua** (ii) dilakukan pada akhir program (Oktober 2017). Responden pada pengukuran ini sebanyak 16 orang yang terlibat sebagai Ketua/ Sekretaris KSB dan salah satu anggota yang aktif dalam KSB pada 8 kelurahan. Hasil persepsi masyarakat terhadap kemanfaatan program adalah sebagai berikut:



Gambar 7 Persepsi Masyarakat terhadap Kemanfaatan Program Pembentukan dan Penguatan KSB

Dalam jangka waktu lima bulan (Mei-Oktober 2017), hasil pengukuran menunjukkan terjadinya peningkatan kemanfaatan yang signifikan, yaitu sebanyak 37%. Pada awal pengukuran masih berpendapat kemanfaatannya sedang (50%) dan di akhir pengukuran

telah berubah persepsinya menjadi tinggi (87%). Hal ini lebih dikarenakan adanya pelatihan kesiapsiagaan terhadap banjir. Masyarakat merasa dibekali ilmu untuk penanganan banjir baik pra, saat dan pasca bencana. Detail alasan dari masyarakat adalah sebagai berikut:

Tabel 11 Persepsi Masyarakat terhadap Kemanfaatan Program Pembentukan dan Penguatan KSB

Periode Pengukuran Manfaat	Persepsi Masyarakat	Alasan
Periode Pertengahan Intervensi (tahap 1)	Manfaat Rendah	<ul style="list-style-type: none"> Belum ada kegiatan dan belum terjadi bencana
	Manfaat Sedang	<ul style="list-style-type: none"> Telah mempersiapkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap banjir Menjembatani KSB dan bersinergi dengan pemerintah (BPBD)
Periode Akhir Intervensi (tahap 2)	Manfaat Sedang	<ul style="list-style-type: none"> Memiliki KSB dan jika ada bencana banjir bisa langsung bergerak. Membantu penyediaan peralatan untuk penanganan banjir
	Manfaat Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> Mendapat ilmu dan pelatihan, misal cara menolong orang tenggelam atau ketika orang terkena serangan jantung Melatih mental Dapat menanggulangi bencana lebih awal Meminimalisir pencegahan bencana kaitannya dari korban-korban nyawa dan harta benda. Koordinasi, komunikasi dan evakuasi sudah tertata Masyarakat sudah mengetahui alur komunikasi jika terjadi banjir

Sumber: Hasil Wawancara, 2017

2. Manfaat Program Bagi Kelurahan

Pihak kelurahan selalu dilibatkan dalam program ini, sehingga aparat

kelurahan merasa mendapat manfaat dengan program yang telah dilakukan. Adapun manfaat bagi pihak kelurahan antara lain:

- Mengetahui cara penanggulangan bencana banjir.
- Menjalin kerjasama antara Kelompok Siaga Bencana dengan kelurahan sehingga dapat mensosialisasikan kepada masyarakat di luar KSB agar mereka paham akan penanggulangan bencana.
- Manfaat kerjasama yang akhirnya menjadi mitra kerja: keamanan, kenyamanan, dan kerukunan antar masyarakat. Akan dapat mengajak masyarakat bersama untuk menghadapi kesiapsiagaan dan kewaspadaan bencana, tidak hanya banjir namun juga yang lain. Saling menguntungkan kerjasama antar wilayah.

Kesimpulan

Keberadaan kelompok siaga bencana (KSB) merupakan salah satu bentuk kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana. Kelompok ini menjadi jembatan antara pemerintah maupun NgO dengan masyarakat, dengan harapan dapat menyebarkan informasi dan pelatihan kesiapsiagaan dari pemerintah atau NgO kepada masyarakat di sekitarnya. Dalam pengembangan KSB terdapat beberapa tantangan yang dialami oleh masyarakat yaitu terbagi dalam empat hal: pendanaan, pola pikir, sarana prasarana dan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, kajian ini memberikan rekomendasi beberapa hal terkait dengan tantangan yang ada. Rekomendasi tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 12 Tantangan dan Rekomendasi Pengembangan KSB

No.	Tantangan	Keterangan	Rekomendasi
1.	Pendanaan	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya pendanaan untuk keberlanjutan kegiatan KSB 	<ul style="list-style-type: none"> • KSB telah terintegrasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang untuk tetap mendapatkan pelatihan dan keberlanjutan • Mengkolaborasikan dengan pendanaan dari LPMK karena kegiatan LPMK bersifat non fisik (pelatihan, dll)
2.	Pola Pikir	<ul style="list-style-type: none"> • Perlu memberi pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya tentang keselamatan apabila terjadi bencana dan memberikan pengertian tentang pelatihan yang sudah dilakukan sesuai KSB • Tidak mudah untuk mengajak masyarakat yang benar-benar peduli untuk jadi relawan. Membangkitkan rasa kebersamaan dari masyarakat untuk bergotong royong masih perlu digali • Adanya beberapa pola pikir yang negatif, seperti adanya masyarakat yang bersikap skeptis. Misal dengan berkata: "banjir kan tidak ada" dan "apa bisa berlanjut KSB nanti?" • Masyarakat kurang memahami akan pentingnya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana 	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya kesiapsiagaan bencana melalui BPBD dan KSB

No.	Tantangan	Keterangan	Rekomendasi
3.	Sarana Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> Sarana kesiapsiagaan masih kurang, seperti HT Belum adanya posko untuk kesiapsiagaan bencana 	<ul style="list-style-type: none"> Alat komunikasi semakin modern, saat ini masyarakat telah memiliki alat komunikasi <i>smartphone</i>, sehingga masyarakat bisa memanfaatkan media sosial yang ada di <i>smartphone</i> untuk meningkatkan koordinasi. Posko sementara bisa terintegrasi dengan kantor kelurahan masing-masing.
4.	Partisipasi Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <i>Background</i> (pekerjaan) anggota KSB yang beragam dan sulit untuk berkumpul. Kesadaran dan tanggung jawab masing-masing individu yang terlibat dalam KSB masih ada yang kurang Rekrutmen/ kaderisasi anggota KSB terutama untuk generasi muda masih sulit. Karena butuh orang yang dengan sukarela ikut terlibat dalam KSB. Anggota KSB sudah banyak yang tua dan tidak bisa mengikuti pelatihan yang bersifat fisik. Ketua kurang koordinasi dengan anggota KSB (hanya di Manyaran) Keterbatasan waktu, karena kesibukan yang berbeda-beda. 	<ul style="list-style-type: none"> Pada dasarnya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dapat dilakukan melalui perubahan pola pikir. Melalui pendekatan secara kontinyu kepada masyarakat sekitar dengan memberikan pemahaman tentang pentingnya kesiapsiagaan ini diharapkan masyarakat terutama anak muda akan semakin berkontribusi untuk wilayahnya. KSB Manyaran bisa melakukan komunikasi kembali antara ketua, anggota dan pemerintah kelurahan untuk merestrukturisasi KSB yang ada.

Sumber: Hasil Wawancara dan Analisis, 2017

Ucapan Terima Kasih

Kajian ini merupakan bagian dari Program “**Zurich Flood Resilience Program**” yang dilakukan atas kerjasama Mercy Corps Indonesia (MCI), *Initiative for Urban Climate Change and Environment (IUCCE)*, *Initiative for Regional Development and Environmental Management (IRDEM)*, Pemerintah Kota Semarang dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Palang Merah Indonesia Kota Semarang dan Kesatuan Brimob Simongan Kota Semarang. Kegiatan ini didanai oleh *Zurich Foundation*.

Daftar Pustaka

Carter, W. N. (1991). *Disaster Management: A Disaster Manager's Handbook*. Manila: Asian Development Bank Publication.

Hidayati, D. (2008). Kesiapsiagaan Masyarakat: Paradigma Baru Pengelolaan Bencana Alam di Indonesia. *Kependudukan Indonesia*, III(1), 69–84. Retrieved from <http://ejurnal.kependudukan.lipi.go.id/index.php/jki/article/view/164>

Nazli, N. N. N. N., Sipon, S., & Husni Mohd Radzi. (2014). Analysis of Training Needs in Disaster Preparedness. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 140, 576–580. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.04.473>

Noor, D. (2014). *Pengantar Mitigasi Bencana Geologi* (1st ed.). Yogyakarta: deepublish

Nurromansyah, A. N., & Setyono, J. S. (2014). Perubahan Kesiapsiagaan Masyarakat DAS Beringin Kota

- Semarang dalam Menghadapi Ancaman Banjir Bandang, 2, 231–244. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/298737276_Perubahan_Kesiapsiagaan_Masyarakat_DAS_Berising_Kota_Semarang_dalam_Menghadapi_Ancaman_Banjir_Bandang
- Paramesti, C. A. (2011). Kesiapsiagaan Masyarakat Kawasan Teluk Pelabuhan Ratu Terhadap Bencana Gempa Bumi dan Tsunami. *Perencanaan Wilayah Dan Kota*, 22(2), 113–128. Retrieved from <http://www.sappk.itb.ac.id/jpwk/wp-content/uploads/2014/02/05-Jurnal-3-Chrisantum.pdf>
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Badan. (2012). Retrieved from http://www.gitews.org/tsunami-kit/en/E6/further_resources/national_level/peraturan_kepala_BNPB/Perka_BNPB_1-2012_Pedoman_Umum_Desa_Kelurahan_Tangguh_Bencana.pdf
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana
- Penanggulangan Bencana. (2008). Retrieved from <http://bpbd.sumbarprov.go.id/details/news/37>
- Rinaldi, N. (2015). Pola Pembangunan Kelompok Siaga Bencana. Retrieved from <http://jemarisakato.org/pola-pembangunan-kelompok-siaga-bencana-mengganbungkan-pendekatan-sosial-budaya-dan-politik/>
- Seftiani, S. (2014). *Keberadaan Kelompok Siaga Bencana*. Retrieved from <http://kependudukan.lipi.go.id/id/kajian-kependudukan/bencana-dan-perubahan-iklim/173-keberadaan-kelompok-siaga-bencana>
- Umar, N. (2013). Pengetahuan dan Kesiapsiagaan Masyarakat Menghadapi Bencana Banjir di Bolapapu Kecamatan Kulawi Sigi Sulawesi Tengah. *Jurnal Keperawatan Soedirman*, 8(3), 184–192.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. (2007). Retrieved from https://www.bnpb.go.id/ppid/file/UU_24_2007.pdf